

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH MERDEKA DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Oleh:

Tubagus Nurul Fahmi¹⁾, Titi Stiawati²⁾

6661200102@untirta.ac.id

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹⁾

ABSTRAK

Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka (KIP-Kuliah Merdeka) merupakan salah satu program Indonesia Pintar di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kemendikbudristek berupa bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar yang diberikan kepada para pelajar dengan latar belakang keluarga yang miskin atau rentan miskin di seluruh Indonesia untuk membiayai Pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Program KIP-Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), sebab dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu yang menyatakan program KIP-Kuliah Merdeka tidak tepat sasaran, jadwal pencairan uang saku dan proses KRS yang terlambat, serta kurangnya transparansi bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka Pengganti. Guna menjawab isu-isu tersebut, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C Edward III dengan keempat indikatornya yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Temuan penelitian dalam riset ini bahwa pelaksanaan program KIP-Kuliah Merdeka telah terlaksana dengan baik, mulai dari proses penyeleksian yang sangat ketat, mahasiswa yang menjadi pengganti penerima beasiswa KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang sebelumnya mencalonkan diri namun tidak lolos, Serta yang menjadi hambatan bagi proses pencairan uang saku maupun proses KRS adalah mahasiswa yang telat mengisi registrasi ulang yang telah dihimbau sebelumnya.

Kata Kunci : Implementasi, KIP-Kuliah Merdeka

ABSTRACT

The Indonesia Smart Card for Merdeka College (KIP-Kuliah Merdeka) is one of the Smart Indonesia programs during the administration of President Joko Widodo through the Ministry of Education and Culture in the form of cash assistance, expanding access and learning opportunities provided to students with poor or vulnerable family backgrounds in throughout Indonesia to finance education. This research was conducted to find out the Implementation of the KIP-Independence College Program at Sultan Ageng Tirtayasa University (UNTIRTA), because in its implementation there were several issues which stated that the KIP-Independence College program was not on target, the schedule for disbursing pocket money and the KRS process was delayed, and there was a lack of transparency for students receiving the KIP-Kuliah Merdeka Replacement scholarship. In order to answer these issues, researchers used the theory of Policy Implementation from George C Edward III with its four indicators namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure using a Descriptive Qualitative research method.

The research findings in this research are that the implementation of the KIP-Kuliah Merdeka program has been carried out well, starting from a very strict selection process, students who are substitutes for KIP-Kuliah scholarship recipients are students who previously nominated themselves but did not pass, as well as those who become obstacles to the process disbursement of pocket money and the KRS process are students who are late in filling out the re-registration that has been requested previously.

Key Words : Implementation, Indonesia Smart Card Free Lecture

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, pemerintahan yang di oleh Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, perlu memberikan bantuan pendidikan dan afirmasi pendidikan tinggi kepada peserta didik dan mahasiswa. Roh dari program tersebut sejalan dengan Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Tulus & Londa, t.t.).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar yang diberikan kepada para pelajar dengan latar belakang keluarga yang miskin atau rentan miskin di seluruh Indonesia untuk membiayai Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

(Kemendikbud, 2020). Kartu Indonesia Pintar (KIP) terbagi menjadi 2 golongan yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang manfaatnya bisa dirasakan oleh para pelajar tingkat SD/SMP/SMA dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP – Kuliah) yang manfaatnya bisa dirasakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia yang kurang mampu baik berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta (Rohmah, dkk., 2022).

Adapun jumlah besaran beasiswa yang diterima oleh tiap mahasiswa yakni Rp. 6 juta yang kemudian Rp. 2,4 juta di serahkan kepada pihak kampus sebagai bayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Rp. 4,2 juta diserahkan kepada mahasiswa sebagai uang saku mereka guna membeli keperluan perkuliahan. Namun setelah satu tahun program KIP – Kuliah berjalan, program tersebut digantikan dengan nama lain yakni KIP – Kuliah Merdeka. Perbedaan dari kedua program tersebut terdapat pada jumlah besaran anggarannya seperti pada KIP – Kuliah sebesar Rp. 1,3 triliun, sedangkan pada KIP – Kuliah Merdeka sebanyak Rp. 2,5 triliun. Hal itu juga mempengaruhi besaran UKT maupun uang saku yang diterima oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah Merdeka. Besaran UKT yang diperoleh oleh mahasiswa KIP – Kuliah merdeka disesuaikan dengan akreditasi jurusan yang ia tempuh. semakin tinggi akreditasi jurusan pada universitas yang ia tempuh, semakin besar pula jumlah bayaran UKT nya. Pada

uang saku mahasiswa KIP – Kuliah Merdeka pun bertambah yang tadinya Rp. 4,2 juta menjadi Rp. 5,7 juta.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau yang biasa disebut dengan singkatan UNTIRTA merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Banten yang menjadi salah satu perguruan tinggi yang menerima mahasiswa beasiswa KIP – Kuliah Merdeka, baik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Hingga kini ada 1.363 mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhitung dari Angkatan 2021 sebanyak 763 mahasiswa dan 600 mahasiswa baru Angkatan 2022 yang terbagi di dalam beberapa fakultas seperti FISIP sebanyak 140 mahasiswa, FAPERTA sebanyak 209 mahasiswa, FKIP sebanyak 615 mahasiswa, FT sebanyak 127 mahasiswa, FH sebanyak 115 mahasiswa, FEB sebanyak 151 mahasiswa, dan FK sebanyak 6 mahasiswa.

Dalam proses implementasi program KIP – Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) ada beberapa permasalahan yang muncul dirasakan oleh beberapa mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah, seperti pernyataan yang mengatakan bahwa program KIP – Kuliah Merdeka ini tidak tepat sasaran, hal itu dikarenakan ada mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah yang berkelakuan hedonisme di lingkungan kampus. salah satunya yaitu berangkat kuliah menggunakan kendaraan roda empat bahkan ada mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah yang terlihat dalam postingan media sosialnya bahwa ia sedang menunaikan ibadah umroh.

Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwasanya beasiswa KIP – Kuliah hanya diperuntukan kepada para pelajar dengan latar belakang keluarga yang miskin atau rentan miskin. Selanjutnya ialah masalah terkait jadwal pencairan dana beasiswa KIP – Kuliah Merdeka yang terkesan terlambat tiap semesternya, hal itu sering kali menjadi keluhan bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah di UNTIRTA, sebab uang saku tersebut digunakan oleh mereka guna bertahan hidup di Kota Serang khususnya, tak sedikit mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah yang menunggak bayar kosan dikarenakan uang saku KIP – Kuliah tak kunjung cair juga hingga menjelang Ujian Tengah Semester. Kemudian Prihal kurangnya transparansi pihak pengelola program KIP – Kuliah di UNTIRTA terhadap mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah yang digantikan, sebab pada saat penerimaan mahasiswa baru dan lolos serta berhak menerima beasiswa KIP – Kuliah tak sedikit dari mereka yang mengundurkan diri dari kampus dikarenakan lebih mementingkan untuk mencari pekerjaan dibandingkan dengan berkuliah sebab mereka menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Lalu masalah selanjutnya terdapat pada proses masa Kartu Rencana Studi (KRS) yang berisi mata kuliah yang akan diambil untuk semester depan mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah yang selalu terlambat dibandingkan dengan mahasiswa reguler lainnya, sebab jika mahasiswa reguler ingin segera bisa KRS-an maka mereka perlu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sedangkan mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah dikarenakan dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat kepada tiap universitas maka tunggu konfirmasi terlebih dahulu dari

pihak kemahasiswaan bahwa mereka telah bisa KRS-an. diKarenakan masalah – masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti topik ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Program

Program adalah desain atau rencana yang menguraikan prinsip-prinsip dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi program adalah cara melaksanakan kegiatan dengan tujuan akhir untuk mencapai target program yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi program dilakukan secara teratur dan terencana. Program dapat berupa rencana jangka pendek, proyek, atau kegiatan sehari-hari. Program juga dapat berupa kegiatan atau pelaksanaan yang diselesaikan dengan cara yang biasa dan teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Guna menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini maka peneliti menggunakan Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C Edward III (Subarsono, 2011:90-92.) dipengaruhi oleh empat variable yakni :

1. Komunikasi

diartikan sebagai suatu proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan maksud agar mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (Aristin & Azizah, 2018). Dalam penerapannya kebijakan komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat kebijakan mauapun implementornya dapat konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Terdapat tiga

indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transformasi, Kejelasan, dan Konsistensi. Transformasi yaitu cara penyampaian informasi yang baik kepada para pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Kejelasan yaitu dimana dalam indikator ini informasi yang diterima para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membuat bingung sehingga mereka memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsistensi dimana informasi yang sudah diberikan kepada pelaksana kebijakan harus dikerjakan secara konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

Meskipun suatu implelementasi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun apabila didalam pengimplementasiannya kekurangan sumber daya maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif (Anggara, 2014). Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi suatu implementasi kebijakan terdiri dari Sumber daya manusia yang professional dan kompeten dalam mengelola sumber daya yang ada serta fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai.

3. Disposisi

ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti kejujuran, komitmen dan demokratis (Subarsono, 2011). Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan namun juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (Setyawan dkk., 2016). Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Whitney (1960) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah menemukan fakta dan memberinya makna yang tepat. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, masalah aktual, atau peristiwa yang sedang berlangsung sekarang adalah dikenal sebagai penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif, di sisi lain, mengumpulkan data yang luas dengan

maksud memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fenomena tersebut (Sulhan & Sasongko, 2017).

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam proses penelitian, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen penelitiannya ialah saya sendiri sebagai peneliti dengan melakukan wawancara kepada pihak pelaksana kebijakan yaitu pihak kemahasiswaan UNTIRTA dengan menggunakan alat bantu berupa buku catatan, perekam suara, maupun kamera untuk mendokumentasikan. Dalam memperoleh data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi/pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan. Terdapat dua informan dalam penelitian ini seperti informan kunci yakni pihak Kemahasiswaan UNTIRTA dan informan pendukung yakni Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA.

Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan dipublikasikan dalam Sugiyono (2002:246), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tiga langkah utama dalam analisis data. Menurut William Wiersma (1986), istilah "triangulasi" dalam pengujian kredibilitas mengacu pada proses pemeriksaan data dari berbagai sumber dalam waktu yang berbeda-beda (Sugiyono, 2007:273).

HASIL PENELITIAN

Deskripsi dari hasil penelitian ini adalah data dan fakta-fakta yang peneliti dapatkan secara langsung dengan melakukan observasi di lapangan dan

wawancara kepada informan terkait penelitian ini yang kemudian disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Teori Implementasi George C Edward III dipilih dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh sebab itu, agar penelitian ini menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya maka harus mempengaruhi keempat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi. Berikut penjelasan tiap indikator dari teori implementasi kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan penelitian ini.

Komunikasi

Pada bagian ini peneliti menaritahu Komunikasi yang terjalin dalam pengimplementasian Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah berjalan, hal itu dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan kepada para informan, yaitu Gina Fithria selaku key informan dari pihak Kemahasiswaan UNTIRTA serta mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah di UNTIRTA selaku secondary informan dalam penelitian ini.

Berdasarkan wawancara dari ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin sudah cukup baik dalam pengimplementasian Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, entah proses dari atas kebawah yakni dari Puslapdik yang memberikan sosialisasi kepada perguruan tinggi maupun LLDIKTI, hingga proses secara teknisnya yang dilakukan oleh pihak kemahasiswaan yang kemudian dipantau dan dibina oleh rektor beserta jajarannya, hingga proses

dari bawah yakni laporan dari mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah kepada koordinator tiap fakultasnya lalu di informasikan kepada organisasi yang menaungi mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah tersebut yakni Ikadiksi Untirta, dan dari ikadiksi dikomunikasikan Kembali kepada pihak kemahasiswaan dan seterusnya akan diproses oleh pihak kemahasiswaan dan program KIP – Kuliah ini dapat dikatakan tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Hanya saja terkadang pihak kemahasiswaan tidak komunikasi terlebih dahulu kepada Ikadiksi untirta tapi langsung ke Koordinator KIPK tiap fakultas. Sehingga terjadi temuan dari Irjen bahwa pihak kemahasiswaan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk kriteria yang menjadi sasaran untuk menerima beasiswa KIP – Kuliah di UNTIRTA itu sendiri telah dijelaskan dengan baik dan berkesan positif dari informan. Adapun persyaratan yang telah dijelaskan ialah harus lulusan SMA sederajat hingga dua tahun sebelumnya, kemudian lulus seleksi kampus seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) maupun bagi yang usulan masyarakat bisa melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) atau jalur mandirinya UNTIRTA. bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah di UNTIRTA yang usulan masyarakat bisa juga memilih jurusan yang diploma. sebab usulan masyarakat lebih luas. Hanya saja ada beberapa mahasiswa yang berpendapat terkait KIP – Kuliah susulan ini dalam proses seleksinya tidak tepat sasaran sebab banyak mahasiswa yang mengatakan peserta KIP – Kuliah pengganti ini berasal dari mahasiswa yang mampu hasil dari

titipan organisasi eksternal maupun orang berkepentingan. Dan argumen tersebut telah disanggah oleh pihak kemahasiswaan itu sendiri. Sebab persyaratan lainnya juga harus terpenuhi seperti kepemilikan kartu indonesia pintar (KIP) dari sekolah sebelumnya, itu syarat pertama karena jika memiliki itu sudah pasti lolos. kecuali jika orang tuanya merupakan PNS maka ia tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. yang kedua, kepemilikan kartu kesejahteraan sosial, ketiga kepemilikan kartu PKH (program keluarga harapan) dan yang keempat terdata atau tidaknya di DTKS. jika keempat-empatnya tidak memiliki, maka dihitung berdasarkan hasil penghasilan kotor orang tua, tidak boleh lebih dari 4jt rupiah atau ketika dibagi anggota keluarga tidak lebih dari 750rb rupiah dan berasal dari panti sosial atau panti asuhan, itu juga menjadi persyaratan. dan mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah hanya bisa memilih di prodi dengan akreditasi a, b, atau c.

Sumber Daya

Selanjutnya ialah pada indikator ini peneliti lebih berfokus untuk mewawancarai key informan dengan bantuan secondary informan juga tentunya guna mendapatkan informasi terkait sumber daya dalam pengimplementasian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Setelah dilakukan wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwasanya sumber daya manusia yang menjadi pihak pelaksana implementasi program KIP – Kuliah di UNTIRTA ialah Rektro beserta jajarannya sebagai pihak pengarah atau Pembina dan pihak BAKP selaku pelaksana teknis program ini, namun yang secara khusus mengurus perihal program KIP – Kuliah di UNTIRTA

yakni Gina Fithria, Supriyadi dan Nuryadi selaku pihak kemahasiswaan. Mereka bertiga sudah sangat optimal dalam bekerja walaupun sering kali merasa kesulitan dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan fasilitas pendukung dalam pengimplementasian program KIP – Kuliah di UNTIRTA sudah sangat membantu seperti fasilitas fisik seperti alat-alat perkantoran yakni scanner, printer dan komputer, kemudian hotline yang membantu guna sarana komunikasi dari dan ke kemahasiswaan. terus juga kita punya fasilitas non fisik yang sangat membantu dalam menyebarkan informasi tentang implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah yaitu IKADIKSI UNTIRTA yang menaungi mahasiswa KIP – Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Disposisi

Tindakan atau langkah yang diambil seseorang untuk menangani atau mengelola masalah atau tugas yang telah ditugaskan kepadanya disebut sebagai disposisi. Cara seseorang mengambil keputusan atau mengarahkan tindakan terhadap suatu subjek umumnya disebut sebagai disposisi.

Dalam proses implementasi program KIP – Kuliah di UNTIRTA peneliti telah melakukan wawancara kepada informan terkait disposisi, adapun hasil yang didapat bahwasannya semua pegawai yang berkecimpung pada implementasi program ini sudah sangat jujur dan juga cepat dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu juga didukung oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah di UNTIRTA bahwasanya pihak pelaksana yakni kemahasiswaan tidak pernah memungut dana sedikitpun dari mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah di UNTIRTA. Kemudian sudah

terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari proses pencairan dan pembayaran UKT mahasiswa KIP – Kuliah Walaupun sering terjadi keterlambatan dikarenakan setiap pergantian semester selalu dilakukan pemantauan pendataan mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah dengan melakukan registrasi on going dan masih adanya beberapa mahasiswa yang sering kali telat dalam pengisian data tersebut, interaksi dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah melalui media whatsapp grup, dan memantau serta membimbing mahasiswa KIP – Kuliah yang IPKnya dibawah rata-rata dengan sangat baik.

Struktur Birokrasi

Setelah melakukan wawancara kepada informan terkait struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa didapatkan hasil bahwa struktur birokrasi paling atas ialah dari pihak puslapdik kemudian turun ke perguruan tinggi lalu diarahkan oleh Rektor dan jajarannya, dari rektor tersebut turun ke pihak BAKP Kemahasiswaan dan yang mengurus secara teknis terkait implementasi KIP – Kuliah di UNTIRTA adalah Gina Fithria, Supriyadi serta Nuryadi. dari situ turun kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP – Kuliah dengan bantuan dari IKADIKSI UNTIRTA. kemahasiswaan menjadi tempat untuk penyebarluasan informasi kemudian jika berkaitan dengan biaya hidup diserahkan kepada mahasiswanya masing-masing sedangkan terkait proses biaya Pendidikan diproses oleh pihak kemahasiswaan. Sedangkan terkait prosesnya dijelaskan bahwa pihak kemahasiswaan melakukan pengajuan pencairan dan biaya Pendidikan ke

penerimaan bukti paling lambat selama dua minggu hari kerja hal tersebut dapat dikatakan cepat dalam proses pengerjaannya.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini adalah data dan fakta-fakta yang peneliti dapatkan secara langsung dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara kepada informan terkait penelitian ini yang kemudian disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Teori Implementasi George C Edward III dipilih dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh sebab itu, agar penelitian ini menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya maka harus mempengaruhi keempat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi. Berikut penjelasan tiap indikator dari teori implementasi kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan penelitian ini.

Komunikasi

George C. Edwards III berpendapat bahwa agar para aktor dapat secara konsisten mempersiapkan dan memutuskan langkah-langkah alternatif untuk mewujudkan kebijakan publik tersebut, maka komunikasi kebijakan publik perlu diketahui dengan memahami tujuan dari keputusan-keputusan mengenai kebijakan publik (Kimbal alfan, dkk. , 2018). Komunikasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang akan menjadi pihak pelaksana kebijakan

tersebut. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. (Abdoellah, dkk. 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan, dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin sudah baik dalam pengimplementasian program KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA, entah proses dari atas kebawah yakni dari puslapdik yang memberikan sosialisasi kepada perguruan tinggi maupun Ildikti hingga proses secara teknisnya yang dilakukan oleh pihak kemahasiswaan yang kemudian dipantau dan dibina oleh Rektor beserta jajarannya, hingga proses dari bawah yakni laporan dari mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka kepada koordinator tiap fakultasnya lalu di informasikan kepada organisasi yang menaungi mahasiswa penerima beasiswa kirk tersebut yakni IKADIKSI UNTIRTA dan dari IKADIKSI dikomunikasikan Kembali kepada pihak kemahasiswaan dan seterusnya akan diproses oleh pihak kemahasiswaan dan program KIP-Kuliah Merdeka ini dapat dikatakan tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Hanya saja terkadang pihak kemahasiswaan tidak komunikasi terlebih dahulu kepada IKADIKSI UNTIRTA tapi langsung ke Koordinator KIPK tiap fakultas. Dan kemarin ada temuan dari irjen bahwa pihak kemahasiswaan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk kriteria yang menjadi sasaran untuk menerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA itu sendiri telah dijelaskan dengan baik dan berkesan positif dari informan tersebut. Hanya

saja ada beberapa mahasiswa yang berpendapat terkait KIP-Kuliah Merdeka susulan ini dalam proses seleksinya tidak tepat sasaran sebab banyak rumor yang mengatakan peserta KIP-Kuliah Merdeka pengganti ini berasal dari mahasiswa yang mampu hasil dari titipan organisasi eksternal maupun orang berkepentingan dan argumen tersebut telah disanggah oleh pihak kemahasiswaan itu sendiri. Ia menjelaskan bahwasanya mahasiswa yang menjadi pengganti merupakan mahasiswa yang sebelumnya mencalonkan diri namun tidak lolos dalam penyeleksian karena disebabkan jumlah kuota penerima beasiswa KIP-Kuliah yang terbatas di UNTIRTA.

Sumber Daya

Dalam Nugroho (2014), Van Matter dan Van Horn menyatakan: 628) bahwa dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya material (material resources) diperlukan untuk terlaksananya program. Sumber daya manusia merupakan yang paling signifikan sebab selain menjadi subyek implementasi kebijakan juga merupakan obyek implementasi kebijakan. Dalam proses penegakan kebijakan, faktor sumber daya ini memegang peranan penting. Hal ini menjelaskan bahwa betapapun jelasnya peraturan perundang-undangan, seberapa akurat komunikasi (sosialisasi) ketentuan dan peraturan tersebut, bukan tidak mungkin kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif jika pelaksana yang bertanggung jawab kurang kompeten dan tidak mampu melakukan tugasnya (Edward III dalam Nugroho, 2014: 636). Jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program merupakan komponen yang terdapat pada sumber daya. Jika sumber daya manusia yang menjadi pihak pelaksana kebijakan tidak memadai dalam segi jumlah maupun kemampuannya, hal itu berdampak kepada ketidaksempurnaan proses pelaksanaan kebijakan tersebut, sebab mereka tidak bisa melaksanakan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/ kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Menurut hasil wawancara dengan ketiga informan yakni pihak kemahasiswaan dan dua mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA, Sumber Daya manusia pada saat Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bisa dikatakan terbatas dalam segi teknis pelaksanaannya. Dari pihak kemahasiswaan yang mengurus perihal KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA ini secara teknis hanya ada tiga orang saja yaitu bu Gina, pak Nuryadi dan pak Supriyadi. Namun dalam proses pelaksanaan program ini, mereka bertiga mempunyai skill atau kemampuan maupun pengalaman yang baik di bidang ini. Hal itu membuat program KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA berjalan dengan baik pula. Selain itu ketiga pihak pelaksana tersebut juga dibantu oleh pihak-pihak lain yang sekiranya terkait dengan program ini misalnya akademik,

registrasi dan yang lainnya. Selain itu dari pihak Rektor beserta jajarannya selalu melakukan pengawasan perihal program ini serta IKADIKSI UNTIRTA turut serta dalam pengoordinasian mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA. Adapun fasilitas pendukung guna melancarkan program ini adalah alat percetakan seperti printer maupun scanner, lalu komputer, kemudian whatsapp grup dan juga website kemahasiswaan guna komunikasi dua arah dengan mahasiswa penerima KIP-Kuliah Merdeka serta fasilitas lainnya.

Disposisi

Edward III mengklaim (Nugroho, 2014: 637), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan, serta tekad untuk tekun melaksanakan kebijakan guna mencapai tujuan kebijakan. Disposisi pelaksana kebijakan meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif guna mencapai tujuan kebijakan. pelaksana kebijakan akan mengembangkan disposisi ketika menguntungkan bagi organisasi dan dirinya secara pribadi. Pengetahuan, pemahaman, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan diperlukan untuk proses disposisi ini, yang mengarah pada sikap penerimaan, ketidakpedulian, dan bahkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan, seperti organisasi yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang ada, adalah disposisi yang menyebabkan masalah implementasi kebijakan.

Sikap atau disposisi dari pihak pelaksana dalam proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah berjalan dengan baik, hal itu dilihat dari

kejujuran dan komitmen dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya, seperti dalam melakukan tugasnya tidak pernah sekali pun melakukan pemungutan liar, lalu proses implementasinya juga transparan, dan selalu bekerja dengan tekun yang menjadikan proses implementasi program kipk merdeka di untirta menjadi cepat, efektif dan efisien. Hal itu dapat diketahui setelah melakukan wawancara dengan pihak kemahasiswaan maupun mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA.

Struktur Birokrasi

Pola hubungan kewenangan dan koordinasi antar lembaga pelaksana (instansi) yang terkait dengan pelaksana kebijakan dapat diartikan sebagai pemahaman tentang struktur birokrasi atau organisasi Widodo (2010:102). Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting disamping faktor-faktor komunikasi, sumber daya, dan perilaku pelaksana. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam struktur birokrasi ini adalah adanya Standard Operating Procedure (SOP) (Tribhuwana dkk., 2019). SOP memberi arah pada pelaksana atau implementor dalam hal pemanfaatan waktu, tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk tindakan para pejabat. SOP juga memberi ruang pada pelaksana dalam suatu organisasi bila terjadi mutasi atau perpindahan pegawai ke posisi lain. SOP memberi pijakan yang jelas pada pegawai agar dalam melaksanakan aktivitas barunya tidak mencari-cari bagaimana cara mengerjakan sesuatu, kepada siapa dan apa isi yang dituntut dalam pekerjaannya.

Menurut ketiga informan dalam penelitian ini, Pada saat implementasi

program kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa struktur birokrasi yang ada sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, hal itu dilihat dari proses mulai dari atas yakni komunikasi dengan Puslapdik kepada Rektor beserta jajarannya yang kemudian berkoordinasi kepada pihak pelaksana kebijakan yaitu pihak kemahasiswaan sudah berjalan dengan baik dan lancar hingga akhirnya yakni komunikasi kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA.

Dari keempat variabel tersebut Impelementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah terpenuhi semuanya dan terkesan positif karena pelaksanaannya yang baik. Untuk masalah program KIP-Kuliah Merdeka yang terkesan tidak tepat sasaran maupun kurang transparansinya terkait mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka pengganti pun sudah terjawab langsung oleh bu Gina selaku pihak pelaksana program KIPK merdeka ini, dimana proses penyeleksian beasiswa KIP-Kuliah Merdeka ini sangat ketat, hal itu dilihat dari beberapa persyaratan yang diperlukan agar mendapat beasiswa ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian agar mempercepat proses penggantian mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka mereka dipilih dari mahasiswa yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi akibat jumlah kuota penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka yang terbatas. lalu perihal jadwal waktu pencairan uang saku mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka terlambat disebabkan oleh adanya beberapa mahasiswa yang belum melakukan registrasi ulang di tiap semesternya, hal itu yang dapat

menghambat proses pencairan uang saku maupun proses mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa proses Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah terlaksana dengan baik dilihat dari seluruh variabel yang terdapat pada teori implementasi kebijakan George C Edward III yang telah terlaksana dengan baik oleh pihak kemahasiswaan selaku pihak pelaksana secara teknis dalam proses implementasi program KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA. Seperti pada bagian komunikasi dimana pihak kemahasiswaan selaku pihak pelaksana kebijakan ini pun tak hanya melakukan proses pendaftaran beasiswa KIPK nya saja namun mahasiswa selalu dipantau dan dibimbing hingga mereka lulus, pada indikator sumber daya dijelaskan bahwa sudah sangat optimal dalam pelaksanaannya walaupun SDM yang bergerak secara teknis dapat dikatakan kurang yakni tiga orang saja. Kemudian pada indikator Disposisi dimana sikap pelaksana sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari kejujuran dan komitmennya dalam melaksanakan tugasnya pada proses implementasi program KIP – Kuliah di UNTIRTA. Serta indikator Struktur Birokrasi dalam pengimplementasiannya sudah cukup baik dari pihak puslapdik kemudian turun ke perguruan tinggi lalu diarahkan oleh Rektor dan jajarannya, dari Rektor tersebut turun ke pihak BAKP Kemahasiswaan dan yang mengurus secara teknis terkait implementasi KIP –

Kuliah di UNTIRTA. Adapun terkait KIP-Kuliah pengganti sebenarnya tidak terjadi karena proses penyeleksian beasiswa KIP-Kuliah sangat ketat hal itu dilihat dari beberapa persyaratan yang diperlukan agar mendapat beasiswa ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian agar mempercepat proses penggantian mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah, oleh sebab itu mereka dipilih dari mahasiswa yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi akibat jumlah kuota penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka yang terbatas, lalu menjawab dari pertanyaan seringkali terlambat perihal waktu pencairan uang saku mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka maupun proses KRS-nya, hal itu disebabkan oleh beberapa mahasiswa yang belum melakukan registrasi ulang di tiap semesternya yang menyebabkan terhambatnya proses pencairan uang saku maupun proses mahasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA.

Saran

Jika melihat proses Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Adapun saran dari peneliti perihal implementasi tersebut adalah lebih diperbaiki lagi koordinasi antar kemahasiswaan dengan IKADIKSI UNTIRTA selaku organisasi yang menaungi mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA, kemudian lebih diperbanyak lagi sumber daya manusia yang melaksanakan implementasi program KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA, serta melakukan pemantauan yang lebih baik lagi agar mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah Merdeka di UNTIRTA tidak terlambat lagi dalam proses pengisian data registrasi ulang tiap semesternya.

DAFTAR PUSAKA

- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104.
- Manongga, A., Pengemanan, S., & Kairupam, J. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Aristin, R., & Azizah, R. N. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI DESA KADUARA TIMUR SUMENEP MADURA (Vol. 8, Nomor 2).
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.
- Sugiyono. (2009). Analisis Kebijakan Publik.
- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.
- PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, K. R. dan T. (2020). Program Indonesia Pintar. https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1.
- Setyawan, D., Nanang, D., & Srihardjono, B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. 6(2).
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). 6(1), 15. www.publikasi.unitri.ac.id
- Tribhuwana, U., Malang, T. D., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu Cahyo Sasmito Ertien Rining Nawangsari. *Dalam Journal of Public Sector Innovation* (Vol. 3, Nomor 2).
- Tulusan, F. M. G., & Londa, Y. (t.t.). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di SMKNegeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." Andi Arnida Esa Putri Abram.
- Subarsono, A. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.